

## PENGARUH KOMPONEN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENCEGAH KECURANGAN PADA PERUSAHAAN

Dewi Sofianingsih  
Universitas Negeri Surabaya  
queensofia92@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this study is to analyze and find out the influence of the control structures components internal to prevent cheating on the company. To prevent on corporations, starting from an internal control. To treat or prevent fraud on government agency, the preventive effort is required with regard to how to control the driving factor for incidence of fraud. To implement the strategy, the internal control system should be applied effectively. The effectiveness of legal provisions could not be achieved if not supported norms and ethical values from related parties. In addition to internal controls there are two other key concepts in the prevention of fraud, fraud awareness and fraud risk assessment. The results of this research are important for internal controls to prevent fraud on the company. In the prevention if an internal control structures have been placed and run well, opportunities for fraud that are not detected will be reduced.*

**Keywords :** *fraud, internal control, fraud awareness, fraud risk assessment.*

### PENDAHULUAN

Kecurangan pada beberapa perusahaan sering terjadi, maka dari itu harus dilakukan suatu pengendalian internal. Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa internal. Apabila perusahaan memiliki pengendalian internal yang kuat, akan mengurangi terjadinya kecurangan pada perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009).

Diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi terjadinya *fraud* dengan menggunakan pemikiran yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasi adalah penyebab utama terjadinya *fraud* sehingga bisa dirumuskan strategi yang tepat untuk

menghilangkan atau paling tidak mengurangi intensitas yang ditimbulkan dari *fraud* tersebut. Hal ini kemudian yang disebut sebagai pencegahan *fraud*.

Untuk menangani maupun mencegah *fraud* pada badan pemerintah, diperlukan upaya preventif yang berkaitan dengan cara mengendalikan faktor pendorong timbulnya *fraud*. Untuk melaksanakan strategi tersebut, maka sistem pengendalian internal harus diterapkan secara efektif. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009).

Maraknya berita mengenai indikasi penyimpangan (*fraud*) di dalam perusahaan dan juga pengelolaan negara di surat kabar dan televisi semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan *fraud* selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Dalam konteks organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya.

*Fraud* merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terang-terangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa *fraud* telah terjadi, namun *fraud* adalah kejahatan terstruktur yang merusak sendi-sendi tata kelola baik di perusahaan maupun dalam pelayanan publik. Korupsi sebagai salah satu bentuk *fraud* merusak kehidupan berbangsa, menyengsarakan rakyat, dan menjadi penyebab kemiskinan. Oleh karena itu *fraud* harus diberantas, setidaknya-tidaknya ada upaya untuk meminimalkan terjadinya *fraud*.

*Fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Karena itu upaya mencegah *fraud*, dimulai dari pengendalian internal. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*) (Tuanakotta, 2007).

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil. Apabila kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Karena itu di dalam perusahaan dibutuhkan sistem pengendalian internal agar kesalahan dan kecurangan dapat dihindari. Unsur sistem pengendalian internal digunakan untuk melihat apakah sistem pengendalian yang berjalan efektif atau tidak.

Pengendalian internal adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992).

Dengan dibangun dan diimplementasikannya pengendalian internal, diharapkan akan meminimalisir kecurangan pada perusahaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Dan dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba, dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Untuk itu setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang

mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas (Amrizal,2004).

Dengan permasalahan tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui komponen struktur pengendalian internal dalam suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Audit**

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan (Guy, 2003).

### **Tipe Audit**

Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Berikut ini akan dijabarkan definisi dari tipe audit tersebut:

(1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) adalah audit yang dilakukan oleh auditor independent terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit

(2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai di kalangan pemerintahan

(3) Audit Operasional (*Operational Audit*), audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a) Mengevaluasi kinerja
- b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut (Mulyadi, 1998).

### **Konsep Sistem Pengendalian Internal**

Struktur pengendalian internal yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami struktur pengendalian intern yang berlaku dalam entitas. Hal tersebut sesuai dengan standar pekerjaan lapangan kedua yang berbunyi: “Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Disamping itu adanya pengendalian menjamin kebijakan dan pengarahan – pengarahan manajemen menjadi cukup memadai. Beragam teknik pengendalian diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan serta untuk mengatur aktivitas yang menjadi tanggung jawab manajemen. Adanya suatu

pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan yang efektif (Mulyadi, 1998).

### **Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal semua tindakan yang dilakukan oleh manajemen, direksi, komisaris, ataupun pihak lain untuk mengelola resiko dan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Manajemen merencanakan, mengorganisir dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk meningkatkan kepastian bahwa tujuan akan tercapai. Sistem pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, assesment resiko, kegiatan (prosedur) pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian (Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004).

Terdapat tiga langkah dalam mengevaluasi pengendalian internal, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi kegiatan pokok, resiko dan kemungkinan adanya kebobolan pada setiap komponen operasi perusahaan dan merumuskan sasaran – sasaran pengendalian dalam hubungannya dengan kegiatan tersebut.
- 2) Menguraikan (dengan flowchart) dan memahami berbagi sistem yang dipergunakan dalam mengolah transaksi – transaksi, melindungi harta perusahaan dan menyiapkan laporan akuntansi keuangan.
- 3) Mengevaluasi sistem, dengan perhatian khusus terhadap kelemahan – kelemahan penting yang mungkin ditemukan, untuk memastikan bahwa sistem tersebut memberikan kepastian yang wajar bahwa tujuan pengendalian mungkin dicapai (Willson dan Campbell, 1986).

## **Tujuan Pengendalian Internal**

Ada 4 tujuan pengendalian internal, yaitu:

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting.

2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan – pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber – sumber dana yang tidak efisien.

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

## **Pengertian Kecurangan**

Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang

dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial (Bologna, G.Jack., *et all*, 1993).

### **Kategori Kecurangan**

Kategori Kecurangan ada tiga kelompok:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*),

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*),

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

c. Korupsi (*Corruption*),

Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*) (*Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000)*).

### **Komponen Pengendalian Internal**

Menurut *Committee of Sponsoring of the Tread Way Commission (COSO)* (2004) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup seluruh tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan atau menggambarkan seluruh sikap manajemen, direktur, dan pemilik satuan usaha tentang pengendalian internal yang dapat menimbulkan kesadaran bagi para



anggota organisasi tersebut mengenai pentingnya pengendalian semacam itu bagi satuan usaha yang bersangkutan.

Sebagian dari lingkungan pengendalian ini dapat dikendalikan oleh manajemen dengan menggunakan kebijakan-kebijakan dan prosedur tertentu, seperti: (1) Penggunaan anggaran dan laporan-laporan keuangan sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan, tujuan, perencanaan, dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; (2) Penggunaan pegawai yang saling menguji (*check and balance*) untuk memisahkan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh digabung (tidak kompatibel) serta untuk mengadakan supervise oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi; (3) Adanya serta sampai seberapa jauh pengendalian terhadap penggunaan metode pengolahan data serta terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem oleh perusahaan tersebut.

Untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian, berikut ini adalah sub elemen terpenting yang harus dipertimbangkan oleh auditor:

- a. Integritas dan nilai-nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- e. Struktur organisasi
- f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

## 2) Penaksiran Risiko (*risk assessment*)

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan

ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan.

Manajemen dapat membuat rencana, program atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya atau lain. Risiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti perubahan dalam lingkup operasi, personel baru, sistem informasi baru atau yang diperbaiki, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru dan muncul kompetitor baru.

### 3) Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

1) Pemisahan tugas yang memadai Empat pedoman umum dalam pemisahan tugas untuk mencegah salah saji, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mempunyai kepentingan khusus bagi auditor, yaitu:

- a. Pemisahan pemegang (*custody*) aktiva dari akuntansi.
- b. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan.
- c. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan.
- d. Pemisahan tugas dalam PDE

2) Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas

Setiap transaksi harus diotorisasi memadai jika ingin pengendalian tersebut memuaskan. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu otorisasi umum (*general*

*authorization*) dan otorisasi khusus (*specific authorization*). Manajemen menyusun otorisasi umum bagi perusahaan untuk ditaati bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum adalah penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit untuk pelanggan, titik pemesanan kembali yang pasti untuk melakukan pembelian. Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sehingga manajemen lebih memilih membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya adalah otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai. Kebijakan otorisasi baik umum maupun khusus harus dibuat oleh manajemen puncak.

### 3) Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen merupakan bukti terjadinya transaksi berikut harga, sifat, dan syarat-syarat transaksi. Contoh dokumen yang banyak dijumpai adalah faktur, cek, dan kontrak. Dokumen berfungsi sebagai pengantar informasi ke seluruh bagian organisasi klien dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi tercatat dengan benar.

Prinsip-prinsip relevan tertentu dalam membuat rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang pantas. Dokumen dan catatan sebaiknya:

- a. Berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen jika diperlukan kembali.
- b. Disiapkan pada saat terjadi atau sesudah.

- c. Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat dimengerti dengan jelas.
- d. Dirancang sedapat mungkin untuk multiguna sehingga meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda.

#### 4) Pengendalian Fisik atas aktiva dan catatan

Pengendalian fisik berhubungan dengan perbatasan dua jenis akses terhadap aktiva dan catatan penting

#### 5) Penilaian independent terhadap kinerja

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas ke empat prosedur yang lain, yang sering kali disebut pengecekan indepen atau verifikasi internal. Kebutuhan pengecekan independen meningkat karena struktur pengendalian intern cenderung untuk berubah setiap saat jika tidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering. Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur verifikasi internal adalah orang tersebut harus independent dan bertanggung jawab menyiapkan data. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi dapat dirancang sehingga membuat banyak prosedur verifikasi intern diotomatisasi sebagai bagian dari sistem.

#### 4) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Sistem informasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Komunikasi dapat

dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen. Pembukaan saluran komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindak lanjuti.

#### 5) Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal yang ada, laporan audit intern, laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan atas tagihan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan pengaruh komponen struktur pengendalian internal untuk mencegah kecurangan pada perusahaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Komponen Struktur Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kecurangan Pada Perusahaan**

Resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrity risk*, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal, atau tindakan

penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik / reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada perusahaan.

Internal auditor harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan ini memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.

Untuk mengatasi kecurangan tersebut perlu dilakukan pengendalian internal. Struktur pengendalian internal itu sendiri sebagai suatu tipe pengawasan diperlukan karena adanya keharusan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Seorang manajer / pemilik perusahaan yang merasa tidak memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk mengelola sendiri semua kegiatan perusahaannya, akan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Apabila pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang perusahaan kepada orang lain, pada saat itu pula pemilik perusahaan perlu untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh para fungsionaris tersebut.

Pengendalian internal terdiri dari lima komponen berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Inti suatu bisnis adalah orang-orangnya dengan karakteristiknya termasuk integritas, nilai-nilai, etika dan lingkungan tempat mereka bekerja. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar untuk semua

komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Hal-hal tersebut merupakan mesin penggerak perusahaan dan merupakan fondasi segala sesuatunya ditempatkan.

## 2. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas, dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana suatu resiko harus dikelola. Jadi, suatu perusahaan harus mewaspadaai dan mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi organisasi beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait.

## 3. Informasi dan Komunikasi

Disekitar aktivitas-aktivitas ini terdapat sistem informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini sendiri adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Hal ini memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan mnukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

## 4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan apakah arahan manajemen dilaksanakan dengan baik atau tidak. Beberapa hal yang penting dalam aktivitas pengendalian, yaitu: (a) Pemisahan tugas, (b) Dokumen dan catatan yang memadai, (c) Akses terbatas ke harta

karyawan organisasi, (d) Pengecekan akuntabilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen, dan (e) Pengendalian pengolahan informasi

## 5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus menerus, atau evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya.

## Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. ( COSO: 1992)

## SIMPULAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan selalu menghadapi berbagai resiko yang biasanya disebut dengan resiko bisnis (*bussiness risk*). Termasuk diantaranya adalah resiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang tergolong dalam resiko integritas (*Integrity Risk*). Menurut ACFE, kecurangan yang terjadi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori kecurangan, kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*), penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), dan korupsi (*Corruption*).

Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian internal yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut COSO, struktur pengendalian internal terdiri



atas lima komponen, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*), Standar Pengendalian (*Control Activities*), Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

Jika struktur pengendalian internal sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tidak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian internal agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

ACFE. 2000. *Fraud Examiners Manual*, Third Edition

Amrizal. 2004. *Membangun Kultur Dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan*, <http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/kultur.pdf>. Diakses tanggal 14 Februari 2013

Bologna, G. Jack, Lindquist Robert J, dan Wells Joseph T. 1993. *Fraud is Criminal Deception Intended to Financially Benefit The Deceiver*

Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Cmmission (COSO). 1992. Ademdum 1994. *Internal Control Integrated Framework*. New York: AICPA Publication

COSO. 2004. Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations

Guy, Alderman Winters. 2003. *Auditing*, edisi 5, Jakarta: Erlangga

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit

Manning, George A. 1999. *Financial Investigation and Forensic Accounting*, CRC Press Boca Raton New York Washington, D.C

Mulyadi dan Kanaka. 1998. *Auditing*, edisi 5, Jakarta: Salemba Empat

Ruslan. 2009. *Internal Control Berbasis COSO*. Diunduh dari [www.mediareformasi.com](http://www.mediareformasi.com), 12 April 2013.

Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Struktur Pengendalian Intern*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA

Wilson, James D and John B. Campbell. 1986. *Controllershship: Tugas Akuntan Manajemen*, edisi 3, Jakarta: Erlangga